

Katalog:1202059.5217

LAPORAN KINERJA

BPS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
2016



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Laporan Kinerja BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat 2016

ISBN: 978-602-1059-29-6

No. Publikasi: 52510.1601

Katalog: 1202059.5217

Ukuran Buku: B5 (18,2 x 25,7 cm)

Jumlah Halaman: vii + 56 Halaman/Pages

Naskah:

Sub Bagian Bina Program

BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Gambar Kulit:

BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Diterbitkan oleh:

BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau mengandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dibuat sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan tindak lanjut TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengindahkan prinsip-prinsip *Clean Government* dan *Good Governance*.

Laporan ini dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas yang diberikan pemerintah kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyelenggarakan perstatistikan, melaksanakan koordinasi dan kerjasama serta mengembangkan dan membina perstatistikan dengan instansi lain baik pemerintah maupun swasta, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, laporan ini juga sebagai masukan bagi BPS dalam mengevaluasi kegiatan BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016 dan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BPS terutama di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan sampai penerbitan laporan ini. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini dimasa datang, sangat kami harapkan.

Mataram, 1 Maret 2017
Badan Pusat Statistik
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kepala,



Endang Tri Wahyuningsih

		hal
Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
Daftar Gambar		iv
Daftar Lampiran		v
Ringkasan Eksekutif		vi
Bab I	Pendahuluan	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Maksud dan Tujuan	1
	1.3 Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat	2
	1.4 Sumber Daya Manusia (SDM) BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat	3
	1.5 Potensi dan Permasalahan	5
	1.6 Sistematika Penyajian Laporan	6
Bab II	Perencanaan Kinerja	7
	2.1 Rencana Strategis (Renstra) BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015-2019	7
	2.2 Perjanjian Kinerja (PK) BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016	12
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	16
	3.1 Capaian Kinerja BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016	16
	3.2 Perkembangan Capaian Kinerja BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 terhadap Target Renstra 2016 dan 2019	27
	3.3 Kegiatan Prioritas BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016	30
	3.4 Upaya Efisiensi BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016	31
	3.5 Realisasi Anggaran di BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016	32
	3.6 Prestasi dan Inovasi BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016	33
Bab IV	Penutup	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Provinsi NTB 2015-2019	11
Tabel 2	Target Kinerja BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat 2016	12
Tabel 3	Kontribusi Unit Kerja Terhadap Penyusunan Target Indikator	14
Tabel 4	Rata-rata Capaian Kinerja BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2016	16
Tabel 5	Capaian Kinerja Tujuan 1:Peningkatan Kualitas Data Statistik 2016	18
Tabel 6	Capaian Kinerja Tujuan 2: Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik 2016	22
Tabel 7	Capaian Kinerja Tujuan 3: Peningkatan Birokrasi yang Akuntabel 2016	25
Tabel 8	Capaian Kinerja 2016 terhadap Target Renstra 2015-2019	28
Tabel 9	Capaian Kinerja Aktivitas Sensus Ekonomi 2016 Tahun Anggaran 2016	30
Tabel 10	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran menurut Program Tahun 2016	31
Tabel 11	Realisasi Anggaran Menurut Program Tahun 2016	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Komposisi SDM BPS Provinsi NTB Menurut Tingkat Pendidikan 2016	4
Gambar 2	Distribusi SDM BPS Provinsi NTB Menurut Bidang/Bagian 2016	4
Gambar 3	Target dalam Renstra 2016	5
Gambar 4	Visi dan Misi BPS Provinsi NTB 2015-2019	8
Gambar 5	Nilai Inti BPS	10
Gambar 6	Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Provinsi NTB	11
Gambar 7	Perkembangan capaian kinerja 2012-2016	17
Gambar 8	Target dan Realisasi Indikator “Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik” Tahun 2015 dan 2016	18
Gambar 9	Target dan Realisasi Indikator “Persentase konsumen terhadap pelayanan data BPS” Tahun 2015 dan 2016	21
Gambar 10	Profil Konsumen Menurut Pemanfaatan Data BPS Tahun 2016 (SKD 2016)	23
Gambar 11	Target dan Realisasi Indikator “Hasil Penilaian Sakip Oleh Inspektorat” Tahun 2015 dan 2016	25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Susunan Organisasi BPS Provinsi NTB	36
Lampiran 2	Renstra BPS Provinsi NTB 2015-2019	37
Lampiran 3	Perjanjian Kinerja BPS Provinsi NTB tahun 2016	38
Lampiran 4	Pengukuran Capaian Kinerja BPS Provinsi NTB 2016	44
Lampiran 5	SDM BPS Provinsi NTB Tahun 2016	48
Lampiran 6	Kegiatan BPS Provinsi NTB Tahun 2016	49
Lampiran 7	Response Rate Survei Tahun 2016	51
Lampiran 8	Judul Publikasi yang Terbit Tahun 2016	54
Lampiran 9	Daftar Instansi yang Menerima Publikasi BPS Provinsi NTB 2016	56

RINGKASAN EKSEKUTIF

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, memberikan wewenang kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyelenggarakan kegiatan statistik dengan cara Sensus, Survei, dan Kompilasi Produk Administrasi, dan cara lainnya, serta mengumumkan hasilnya secara berkala atau sewaktu-waktu dan terbuka kepada masyarakat baik instansi pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun perorangan. Visi BPS Provinsi yaitu “BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat pelopor data statistik terpercaya untuk semua”, dijabarkan dengan melaksanakan Pembangunan Perstatistikan di Wilayah Nusa Tenggara Barat.

Sasaran Pembangunan Statistik, adalah :

1. Tersedianya data dan informasi statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu di seluruh bidang pembangunan serta meningkatkan pelayanan bagi pengguna data dan informasi statistik;
2. Terwujudnya struktur organisasi BPS secara efektif dan efisien dalam kerangka mewujudkan *good governance* serta meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS;
3. Meningkatnya kapasitas SDM dalam pengetahuan, penguasaan ilmu, metode statistik, dan teknologi informasi mutakhir guna menyempurnakan metoda pengumpulan, pengolahan dan diseminasi statistik;
4. Meningkatnya kerjasama antar lembaga statistik/penelitian dalam negeri maupun internasional atas dasar saling menghormati kemandirian dan menguntungkan dalam rangka menghasilkan data dan informasi statistik berkualitas internasional;
5. Terwujudnya SSN dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi lembaga-lembaga statistik yang ada baik di instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat; dan
6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fisik.

Guna mencapai sasaran dari pembangunan perstatistikan yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2016 BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan tiga program utama, terdiri dari:

- (i). Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)
- (ii). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA)
- (iii). Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)

Penyelenggaraan program-program tersebut dibiayai Pemerintah Republik Indonesia melalui APBN yang dituangkan ke dalam DIPATahun 2016, dengan nilai sebesar Rp28.500.400.000,- dengan realisasi penggunaan mencapai Rp 26.704.343.916- atau sebesar 93,69 %.

Secara umum kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program-program yang telah ditetapkan adalah:

- (1) Belum memadainya sumber daya manusia baik organik BPS maupun non organik yang direkrut sebagai petugas lapangan dari segi kualitas dan kuantitas.
- (2) Sulitnya kondisi geografis di daerah-daerah pedesaan membutuhkan sarana komunikasi dan transportasi yang lebih baik. Hal ini terjadi di hampir semua desa terpencil terutama Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima.
- (3) Anggaran yang ada memaksa jumlah dan sebaran sampel belum memenuhi cakupan area yang lebih luas sesuai yang diinginkan oleh pengguna data BPS.
- (4) Kebutuhan pengguna data yang semakin cepat dan tepat menyebabkan makin pendeknya rentang waktu pengumpulan dan penyajian data oleh BPS
- (5) Kerjasama yang belum terjalin dengan baik antara penyuplai data, BPS dan pengguna data
- (6) Pemanfaatan anggaran yang harus semakin efektif dan efisien, dengan mengelola anggaran yang tertib, bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pelopor data statistik terpercaya untuk semua sesuai yang tercantum dalam rencana strategis BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2019, pada periode tahun 2016 dibuktikan dengan pencapaian sasaran yang optimal. Dilihat pada tujuan-1 yaitu "Peningkatan kualitas data statistik" dengan indikator kinerja Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik menunjukkan tingkat capaian kinerja yang cukup baik mencapai 110,22 persen. Dimensi kualitas lainnya yang dituangkan dalam tujuan-2 yaitu "Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik" dengan indikator kinerja Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS juga menunjukkan capaian yang sangat baik mencapai 107,22 persen. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat yang merupakan indikator kinerja dalam tujuan-3 "Peningkatan birokrasi yang akuntabel "capaian kerjanya juga sangat baik mencapai 106,58 persen.

Secara umum, hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas BPS sesuai dengan visinya. Pencapaian kinerja dan akuntabilitas BPS menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat nyata. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata capaian sasaran mencapai 104,48 persen dan rata-rata capaian tujuan mencapai 108,00 persen.

1.1. Latar Belakang

Tahun 2016 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pusat Statistik (BPS) 2015-2019. Ada 3 (tiga) tujuan yang harus dicapai BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam Renstra BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015-2019, yaitu: (1) Peningkatan kualitas data statistik, (2) Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, dan (3) Peningkatan birokrasi yang akuntabel. Untuk mempermudah pencapaian tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran-sasaran yang harus dicapai pada tahun 2016.

Pada awal tahun 2016, BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan target kinerja dari setiap indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat 2016. Realisasi dari target yang telah ditetapkan pada awal tahun tersebut, akan dimonitoring setiap triwulanan dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja interim (laporan kinerja triwulanan) dan laporan kinerja tahunan.

Laporan kinerja tahunan wajib disusun oleh setiap Kementerian/Lembaga. Hal tersebut merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 pasal 18 yang menyebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan maupun sasaran BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat akan dituangkan dalam laporan kinerja tahunan. Laporan ini juga merupakan bentuk akuntabilitas BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai penyelenggara Negara dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Hasil dari laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk tahun mendatang.

1.2. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap Instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan tugas pokok, dan dipandang perlu untuk menyampaikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja tahun 2016 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Kepala BPS Republik Indonesia atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan adalah untuk mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2016.

1.3. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

BPS merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas BPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik adalah menyelenggarakan statistik dasar. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik mengatur lebih lanjut bahwa tugas BPS adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan statistik dasar di Provinsi;
- b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Provinsi;
- c. Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di Provinsi;
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BPS Provinsi.

BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai perwakilan BPS di tingkat Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu di Kota Mataram. Kepala BPS mempunyai tugas memimpin BPS Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi BPS Provinsi serta membina aparatur BPS Provinsi agar berdaya guna dan berhasil guna. Untuk melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 Tanggal 3 September 2001 tentang organisasi dan tata kerja perwakilan BPS di daerah, telah ditentukan susunan organisasi Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu :

a. Kepala

Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah jabatan Eselon IIa yang membawahi 5 Kepala Bidang dan 1 Kepala Bagian Tata Usaha (setingkat eselon IIIa) serta dibantu oleh 5 Kepala Sub bagian dan 15 Kepala Seksi (setingkat Eselon IVa)

b. Kepala Bagian Tata Usaha

Kepala Bagian Tata Usaha adalah jabatan Eselon IIIa yang membawahi pejabat setingkat Eselon IVa, yaitu Kepala Sub Bagian Bina Program, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum, Kepala Sub Bagian Urusan Dalam dan Kepala Sub Bagian Perlengkapan.

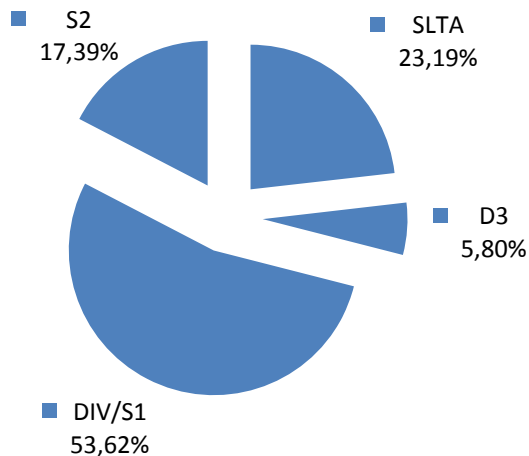
- c. Kepala Bidang Statistik Sosial
Kepala Bidang Statistik Sosial adalah jabatan Eselon IIIa yang membawahi pejabat setingkat Eselon IVa, yaitu Kepala Seksi Statistik Kependudukan, Kepala Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Seksi Statistik Ketahanan Sosial.
- d. Kepala Bidang Statistik Produksi
Kepala Bidang Statistik Produksi adalah jabatan Eselon IIIa yang membawahi pejabat setingkat Eselon IVa, yaitu Kepala Seksi Statistik Pertanian, Kepala Seksi Statistik Industri, Kepala Seksi Statistik Pertambangan, Energi dan Konstruksi.
- e. Kepala Bidang Statistik Distribusi
Kepala Bidang Statistik Distribusi adalah jabatan Eselon IIIa yang membawahi pejabat setingkat Eselon IVa, yaitu Kepala Seksi Statistik Harga Konsumen dan Perdagangan Besar, Kepala Seksi Statistik Keuangan dan Harga Produsen, Kepala Seksi Statistik Niaga dan Jasa.
- f. Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik (Nwas)
Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik adalah jabatan Eselon IIIa yang membawahi pejabat setingkat Eselon IVa, yaitu Kepala Seksi Neraca Produksi, Kepala Seksi Neraca Konsumsi dan Kepala Seksi Analisis Statistik Lintas Sektor.
- g. Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS)
Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik adalah jabatan Eselon IIIa yang membawahi pejabat setingkat Eselon IVa, yaitu Kepala Seksi Integrasi Pengolahan Data, Kepala Seksi Jaringan dan Rujukan Statistik, dan Kepala Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik. (Bagan susunan organisasi BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat secara rinci dapat dilihat pada lampiran 1).

1.4. Sumber Daya Manusia (SDM) BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pada akhir tahun 2016, SDM BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat berjumlah 69 pegawai. Kualitas suatu SDM secara tidak langsung dapat dilihat dari tingkat pendidikan. Komposisi SDM terbesar dengan tingkat pendidikan D-IV/S1, yaitu mencapai 53 persen. Komposisi SDM dengan minimal pendidikan D-IV/S1 mencapai 71 persen. Hal tersebut mencerminkan bahwa kualitas SDM BPS cukup baik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPS. Komposisi SDM menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah.

Gambar 1.

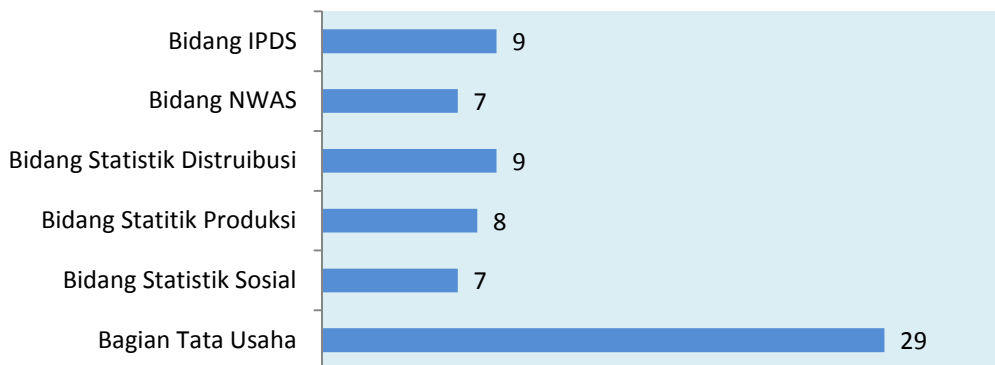
Komposisi SDM BPS Provinsi NTB Menurut Tingkat Pendidikan 2016



Meskipun kualitas SDM secara umum baik, namun jika tidak memperhitungkan beban pekerjaan per pegawai akan mempengaruhi kualitas suatu pekerjaan. Oleh karena itu perlu memperhitungkan beban tugas di masing-masing bidang/bagian dalam menentukan jumlah SDM di suatu satker. Jumlah SDM terbesar berada di bagian tata usaha karena memiliki beban pekerjaan yang kompleks. Sedangkan jumlah SDM paling sedikit berada di bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik (NWAS) dan Bidang Statistik Sosial. Distribusi SDM menurut bidang/bagian pada BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah.

Gambar 2.

Distribusi SDM BPS Provinsi NTB Menurut Bidang/Bagian 2016



1.5. Potensi dan Permasalahan

BPS merupakan *National Statistics Office* (NSO) yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. BPS telah memiliki payung hukum dalam menyelenggarakan kegiatan perstatistikan. Hal tersebut menjadi kekuatan bagi BPS untuk mengembangkan kegiatan perstatistikan kedepannya.

Peranan data statistik sangat penting dalam bidang perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, masyarakat menginginkan agar data dapat tersedia lebih cepat (*faster*), dapat diperoleh lebih mudah (*easier*), lebih berkualitas (*better*) dan lebih murah (*cheaper*). Hal tersebut menjadi fokus utama BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menyediakan data secara lebih cepat, akurat dan dapat diakses publik dengan mudah melalui website BPS.

Disisi lain, responden enggan untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut menjadi salah satu kendala untuk memperoleh data yang berkualitas, mengingat kegiatan statistik yang dilakukan BPS adalah statistik yang bersifat pengakuan, dan bukan pengukuran. Keakuratan pengakuan dari sumber data menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kualitas data statistik.

Data BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat telah banyak digunakan oleh berbagai pihak dalam hal perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Bahkan tiap bulannya release data BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat dinanti-nanti oleh banyak pihak, terutama para ekonom. BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat juga gencar melakukan sosialisasi, agar masyarakat lebih mengenal BPS. Harapannya ketika mereka menjadi responden sensus/survei BPS lebih kooperatif dalam memberikan jawabannya.

Secara umum kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program-program yang telah ditetapkan adalah:

- (1) Belum memadainya sumber daya manusia baik organik BPS maupun non organik yang direkrut sebagai petugas lapangan dari segi kualitas dan kuantitas.
- (2) Sulitnya kondisi geografis di daerah-daerah pedesaan membutuhkan sarana komunikasi dan transportasi yang lebih baik. Hal ini terjadi di hampir semua desa terpencil terutama Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima.
- (3) Anggaran yang ada memaksa jumlah dan sebaran sampel belum memenuhi cakupan area yang lebih luas sesuai yang diinginkan oleh pengguna data BPS.
- (4) Kebutuhan pengguna data yang semakin cepat dan tepat menyebabkan makin pendeknya rentang waktu pengumpulan dan penyajian data oleh BPS
- (5) Kerjasama yang belum terjalin dengan baik antara penyuplai data, BPS dan pengguna data

- (6) Pemanfaatan anggaran yang harus semakin efektif dan efisien, dengan mengelola anggaran yang tertib, bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

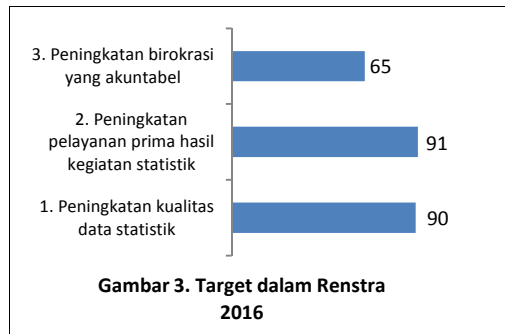
1.6. Sistematika Penyajian Laporan

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja BPS tahun 2016 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang; maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja; tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat; sumber daya manusia BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, potensi dan permasalahan yang dihadapi BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat; serta sistematika penyajian laporan.
- Bab II. Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi Rencana Strategis (Renstra) BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016.
- Bab III. Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi Capaian Kinerja BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016, Capaian Kinerja BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap Target Renstra 2016 dan 2019, Kegiatan Prioritas BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016, Upaya efisiensi di BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, Realisasi Anggaran BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016. Prestasi dan inovasi BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat 2016 dan
- Bab IV. Penutup, pada bab ini berisi tinjauan umum dan tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.

2.1. Rencana Strategis (Renstra) BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015-2019

Visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 adalah “terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. BPS turut berkontribusi dalam pembangunan nasional di bidang statistik. Visi yang disusun BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mewujudkan kontribusi tersebut sebagaimana tercantum dalam Renstra BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015-2019 adalah:

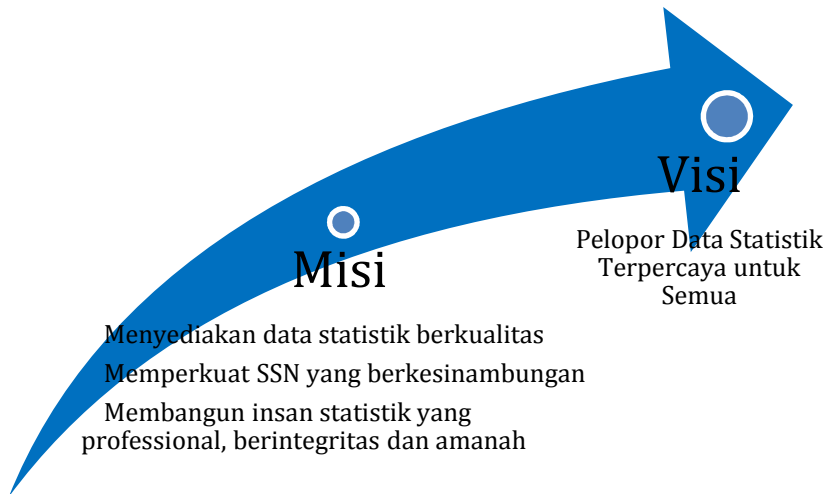


“Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”

“Pelopor” mempunyai makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya. “Data statistik yang terpercaya” yaitu statistik yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. “Untuk semua” dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS (*impartial*) baik pengguna data nasional maupun internasional. Eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak.

Visi tersebut dicapai dengan misi sebagai berikut:

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional
2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional (SSN) yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik
3. Membangun insan statistik yang professional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.



Gambar 4. Visi dan Misi BPS Provinsi NTB 2015-2019

Menyediakan data statistik ...

“Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat (Perpres No.86 tahun 2007)”.

... berkualitas ...

“Berkualitas berarti data statistik yang dihasilkan BPS memenuhi dimensi kualitas yakni relevan, akurat, disajikan tepat waktu, koheren, dapat diakses, dan dapat diinterpretasikan”.

... melalui kegiatan statistik yang terintegrasi ...

“Kata terintegrasi bermakna bahwa penyelenggarakan kegiatan statistik perlu lebih mengedepankan pendekatan fungsional, serta mengurangi pelaksanaan yang bersifat terkotak-kotak (*silo thinking*). Pendekatan fungsional berarti alur proses dari pengumpulan data, pengolahan data hingga diseminasi data dilakukan secara terintegrasi antar *subject matter*. Terintegrasi juga berarti penyelenggaraan statistik yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan statistik, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan”. (UU no. 16 tahun 1997)”.

... dan berstandar internasional...

“Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS akan selalu berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar

internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam *Fundamental Principle of Official Statistics*".

Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan ...

"Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus menerus dan berkelanjutan. (UU no. 16 tahun 1997)".

... pembinaan dan koordinasi ...

"BPS memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran ukuran. (UU no. 16 tahun 1997).

Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik).

Dalam melakukan pembinaan statistik, BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan atau unsur masyarakat lainnya. Upaya pembinaan statistik yang dilakukan BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, meliputi:

1. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik;
2. Pengembangan statistik sebagai ilmu;
3. Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik;
4. Perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam kerangka semangat kerjasama dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya;
5. Pengembangan sistem informasi statistik;
6. Peningkatan penyebaran informasi statistik;
7. Peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk mendukung pembangunan nasional;
8. Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik.

Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Pelaksanaan kegiatan statistik;
- b. Pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

Koordinasi dan atau kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, instansi pemerintah, dan masyarakat dilaksanakan atas dasar prinsip kemitraan. Koordinasi dan/atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik dilakukan dalam rangka membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional. Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik mencakup perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan/atau analisis statistik”.

Membangun insan statistik ...

“Pembangunan insan statistik dilakukan untuk mewujudkan pengejawantahan nilai-nilai organisasi Badan Pusat Statistik, yakni profesional, berintegritas dan amanah”.



Gambar 5. Nilai Inti BPS

... yang profesional...

“Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas”.

... berintegritas ...

“Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur)”.

...amanah...

“Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik”.

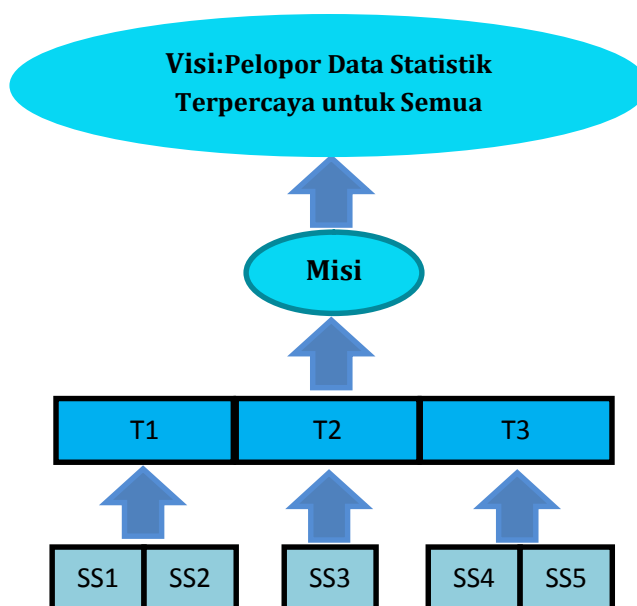
Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015-2019, maka ditetapkan tujuan yang harus dicapai. Masing-masing tujuan memiliki sasaran strategis pencapaian. Sasaran strategis dari masing-masing tujuan dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 1.
Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Provinsi NTB 2016-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
T1. Peningkatan kualitas data statistik	SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS
	SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>respondent engagement</i>)
T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	SS3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>)
T3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	SS4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS
	SS5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

Masing-masing tujuan dan sasaran strategis pada tabel diatas memiliki indikator yang terukur agar dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaiannya. Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 6.
Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Provinsi NTB



2.2. Perjanjian Kinerja (PK) BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016

Pada awal tahun ditetapkan target dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai selama setahun. Penetapan target tersebut tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Sehubungan dengan adanya surat dari Kementerian Keuangan Nomor S-522/MK.02/2016 perihal perubahan PAGU Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P TA 2016 dan Surat Kementerian Keuangan tentang Penghematan/Pemotongan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga (KL) TA 2016 berdampak pada target kinerja BPS. Hal ini disebabkan banyaknya aktivitas kegiatan statistik yang dihentikan yang secara langsung berdampak pada pencapaian kinerja BPS. Selain itu, pada tanggal 23 September 2016 terjadi pergantian pucuk pimpinan BPS Provinsi NTB dari Drs Wahyudin, MM menjadi Ir. Endang Tri Wahyuningsih, MM.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 1 November 2016 ditandatangani Reviu Perjanjian Kinerja oleh Kepala BPS yang baru untuk menggantikan Perjanjian Kinerja sebelumnya yang ditandatangani pada tanggal 23 Februari 2016. Perubahan Target Kinerja BPS pada tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.
Target Kinerja BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
T1. Peningkatan kualitas data statistik	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	90,00	90,00
SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	90,00	90,00
	Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Persen	90,00	90,00
	Persentase pemuatn data MFD dan MBS	Persen	100,00	100,00
	Jumlah release data yang tepat waktu	Aktivitas	28	28
	Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu	Publikasi	39	35
	Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu	Publikasi	2	2
SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan rumah tangga	Persen	91,00	91,00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>(Respondent Engagement)</i>	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan usaha	Persen	96,00	96,00
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	Persen	93,00	93,00
T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS	Persen	91,00	91,00
SS3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>User Engagement</i>)	Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS	Persen	91,00	91,00
	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i>	Pengunjung	40.000	40.000
	Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	20,49	20,49
	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS	Persen	90,00	90,00
	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	90,00	90,00
T3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	65,00	65,00
SS4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS	Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	Persen	4,00	4,00
	Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	Persen	70,00	70,00
SS5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	65,00	65,00
	Jumlah Satker BPS Kabupaten/Kota Yang Berpredikat WBK/WBBM	Satker	1	1

Realisasi dari target perjanjian kinerja tersebut akan dimonitoring setiap triwulanan, kemudian dilaporkan menjadi laporan interim (triwulanan) dan pada

akhir tahun dilaporkan menjadi laporan kinerja. Keberhasilan/kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Kepala BPS RI atas penggunaan anggaran BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Perjanjian Kinerja yang disusun selanjutnya diturunkan ke dalam perjanjian kinerja pada tingkat unit kerja Eselon III dan Eselon IV. Karena itu setiap unit kerja mempunyai kontribusi terhadap penyusunan target kinerja BPS. Peranan unit kerja Eselon III pada setiap penyusunan target indikator dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3.
Kontribusi Unit Kerja Terhadap Penyusunan Target Indikator

Tujuan/Sasaran/Indikator		Tata Usaha	Bidang IPDS	Bidang Stat Sosial	Bidang Stat Produksi	Bidang Stat Distribusi	Bidang Stat	Bidang NWAS
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
T1. Peningkatan kualitas data statistik								
	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik		*	*	*	*	*	*
SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS								
	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik		*	*	*	*	*	*
	Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS		*					
	Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama		*	*	*	*	*	*
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik yang terbit tepat waktu		*	*	*	*	*	*
	Jumlah <i>release</i> data Statistik yang tepat waktu		*	*	*	*	*	*
	Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu		*	*	*	*	*	*
SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>Respondent</i>)								
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan rumah tangga			*	*	*	*	*
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan usaha				*	*	*	*
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan non rumah			*	*	*	*	*

Tujuan/Sasaran/Indikator	Tata Usaha	Bidang IPDS	Bidang Stat Sosial	Bidang Stat Produksi	Bidang Stat Distribusi	Bidang Stat	Bidang NWAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
tangga non usaha							
T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik							
Persentase Konsumen yang puas akan layanan data BPS		*					
SS3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>User Engagement</i>)							
Persentase Konsumen yang puas akan layanan data BPS		*					
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i>		*					
Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional		*					
Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS		*	*	*	*	*	*
Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	*						
T3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel							
Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB	*						
SS4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS							
Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	*						
Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	*						
SS5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS							
Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB	*						
Jumlah Satker BPS Kabupaten/Kota Yang Berpredikat WBK/WBBM	*						

Keterangan: : Penanggung Jawab

*: Kontributor

3.1. Capaian Kinerja BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016

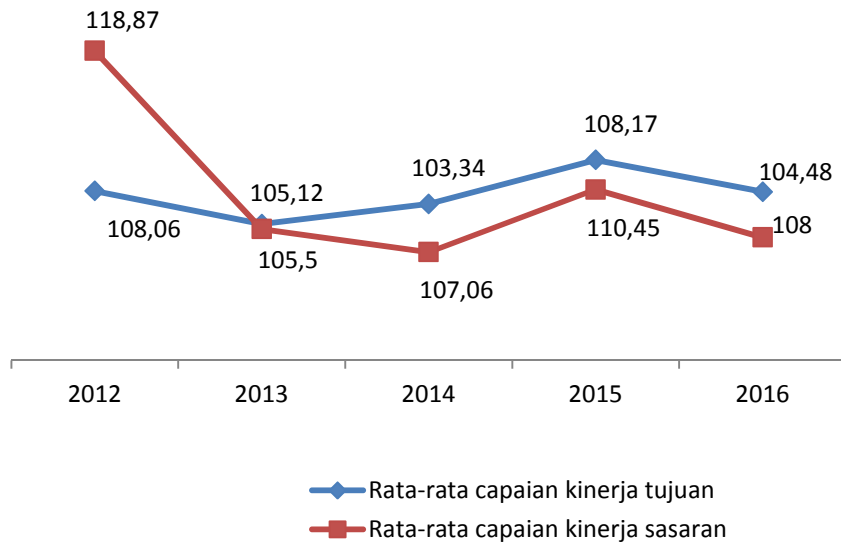
Capaian kinerja BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan pencapaian dari indikator-indikator tujuan dan sasaran strategis selama tahun 2016. Capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target Penetapan Kinerja 2016 yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Tabel 4.
Rata-rata Capaian Kinerja BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2016

Tujuan/Sasaran/Indikator (1)	Jumlah Indikator (2)	Capaian Kinerja (%) (3)
1. Peningkatan kualitas data statistik	1	110,22
1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	6	104,55
1.2 Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>respondent engagement</i>)	3	103,80
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	1	107,22
2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>)	5	94,36
3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	1	106,58
3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS	2	116,43
3.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	2	103,29
Rata Rata Tujuan		108,00
Rata Rata Sasaran		104,48

Hasil pengukuran menunjukkan kinerja BPS NTB pada tahun 2016 untuk tujuan mencapai 108,00 persen, sedangkan untuk sasaran mencapai 104,48 persen. Jika dibandingkan tahun 2015, baik capaian kinerja tujuan maupun capaian kinerja sasaran mengalami penurunan. Pada tahun 2015 capaian kinerja BPS NTB untuk tujuan mencapai 108,17 persen sedangkan untuk sasaran mencapai 110,45 persen. Keadaan Capaian kinerja BPS untuk kurun waktu 2012-2016 dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7.
Perkembangan Capaian Kinerja 2012-2106

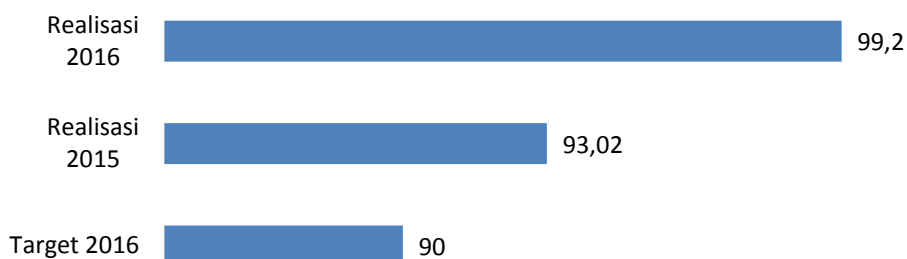


Capaian kinerja dari masing-masing tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada ulasan berikut.

Tujuan 1 Peningkatan Kualitas Data Statistik

Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Pengguna data menginginkan data bisa tersedia lebih cepat (*faster*), lebih murah (*cheaper*), lebih mudah diperoleh (*easier*), dan lebih berkualitas (*better*). Upaya pengembangan yang dilakukan BPS sampai saat ini telah menghasilkan beragam data dan indikator sosial-ekonomi. Meskipun demikian, data BPS tidak jarang mendapat kritik karena dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan. Pro dan kontra mengenai data BPS mengindikasikan bahwa kualitas data BPS masih perlu ditingkatkan. Agar kualitas data BPS semakin meningkat maka peran kerangka penjaminan kualitas dalam penyelenggaraan kegiatan statistik semakin ditingkatkan.

Gambar 8.
Target dan Realisasi Indikator “Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik” Tahun 2015 dan 2016



Keberhasilan tujuan BPS Provinsi NTB dalam aspek kualitas data diukur melalui satu IKU yaitu persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik. Pengukuran indikator tersebut dilakukan melalui Survei Kebutuhan Data (SKD). Hasil SKD menunjukkan bahwa 99,20 persen konsumen merasa puas terhadap kualitas data statistik yang dihasilkan BPS Provinsi NTB. Jika dibandingkan dengan target sebesar 90,00 persen, kinerja BPS Provinsi NTB untuk tujuan pertama telah tercapai dengan nilai capaian sebesar 110,22 persen. Selanjutnya jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, konsumen yang merasa puas sebesar 93,02 persen sehingga kinerja BPS untuk tujuan ini mengalami peningkatan sebesar 6,18 persen.

Tabel 5.
Capaian Kinerja Tujuan 1: Peningkatan Kualitas Data Statistik 2016

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi 2015	Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
T1. Peningkatan kualitas data statistik					
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	90	99,2	110,22	93,02	6,18
SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS					
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	90	99,2	110,22	93,02	6,18
Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	90	93,16	103,51	94,21	-1,05
Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	100	100	100,00	100,00	0

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi 2015	Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah release data yang tepat waktu	28	31	110,71	84	-53
Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu	35	36	102,86	27	9
Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu	2	2	100,00	10	-8
Rata-rata capaian kinerja	104,55				
SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>Respondent Engagement</i>)					
Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan rumah tangga	91	91,98	101,08	94,00	-2,02
Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan usaha	96	99,88	104,04	99,00	0,88
Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	93	98,84	106,28	95,00	3,84
Rata-rata Capaian Kinerja	103,80				

SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna data terhadap kualitas data statistik

Berdasarkan tabel di atas, SS1 di ukur dari 6 indikator, rata-rata capaian pada SS1 mencapai 104,55 persen.

Indikator “Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik” selain merupakan indikator dari tujuan pertama, juga merupakan indikator pertama dari SS1. Berikut penjelasan capaian kinerja dan perubahannya dibanding tahun 2015 dari IKU lainnya pada SS1.

Indikator “Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama” tingkat capaiannya sebesar 103,51 persen, meskipun sedikit menurun jika dibandingkan tahun 2015, namun indikator ini telah mencapai target. Indikator ini bersumber dari Survei Kebutuhan Data (SKD) tahun 2016.

Sementara itu indikator “persentase pemutakhiran data MFD dan MBS”, telah mencapai target dengan tingkat capaian sebesar 100 persen. Selama tahun 2016, tercatat tidak ada perubahan blok sensus maupun perubahan peta wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pada awal tahun 2016 ditargetkan *release* data statistik sebanyak 28 kali, pada pelaksanaannya *release* data diselenggarakan sebanyak 31 kali dengan kata lain capaian kinerja indikator “Jumlah rilis data statistik yang tepat waktu” sebesar 110,

71 persen. Dengan realisasi sebesar itu dapatlah dikatakan BPS Provinsi NTB sudah dapat memberikan kepastian mengenai ketersediaan data dan periodisitas data BPS kepada publik dalam bentuk Berita Resmi Statistik. Meskipun demikian perlu digali lagi agar pengukuran *release* data tidak sekedar terselenggara saja melainkan juga jenis atau variabel data yang dirilis. Jika dibandingkan tahun 2015 dimana aktivitas *release* mencapai 84 kali, maka terjadi penurunan sebesar 53 kali. Terdapat perbedaan pemahaman tentang aktivitas *release* di tahun 2015 sehingga tahun 2015 yang tercatat adalah jumlah Berita Resmi Statistik yang terbit, sedangkan aktivitas *release* sebenarnya tidak sebanyak itu.

Untuk indikator “jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu” dan indikator “Jumlah Publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu” telah mencapai target masing-masing memiliki tingkat capaian sebesar 102,86 persen dan 100 perse.

SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent Engagement)

Berbagai upaya dilakukan BPS untuk meningkatkan response rate kegiatan survei melalui kegiatan pelatihan maupun publisitas. Pengukuran keberhasilannya diwakili oleh 3 (tiga) IKU dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 103.80 persen.

Persentase pemasukan dokumen (*response rate*) survei dengan pendekatan rumah tangga pada tahun 2016 sebesar 91,98 persen. Besaran ini lebih tinggi sedikit bila dibandingkan dengan targetnya yang sebesar 91 persen, namun jika dibandingkan realisasi tahun 2015 yang sebesar 94 persen. Maka telah terjadi penurunan. Penurunan yang terjadi antara lain disebabkan karena dihentikannya pendataan survei berbasis rumah tangga akibat dari penghematan anggaran. Tercatat survei yang dibatalkan antara lain Survei Angkatan Kerja Nasional Tahunan.

Target pemasukan dokumen untuk survei dengan pendekatan usaha pada tahun 2016 sebesar 96 persen. Dengan realisasi sebesar 99,88 persen, capaian kinerja untuk indikator tersebut sebesar 104,04 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar 0.88 persen. Sebagai catatan tingkat *response rate* dimaksud tidak termasuk hasil dari SE 2016.

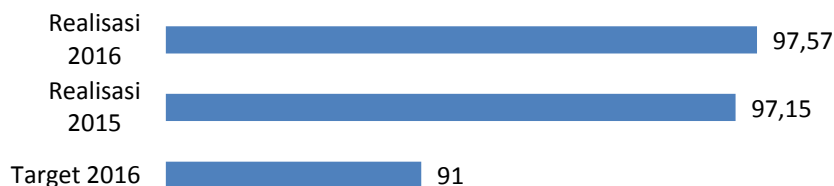
Kenaikan tingkat pemasukan dokumen dialami pada survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha pada tahun 2016, jika dibandingkan tahun 2015 tingkat pemasukannya naik sebesar 3.84 persen. Dari sisi pencapaian target, kelompok survei ini juga memenuhi target dengan capaian sebesar 106.28 persen.

Tujuan Kedua : Peningkatan pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik

Pengukuran pencapaian BPS dalam rangka mencapai tujuan “Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik,” dinilai melalui satu indikator yaitu “Persentase Konsumen yang puas akan layanan data BPS”. Sebagaimana indikator sebelumnya yang terkait dengan konsumen, untuk mendapatkan besaran datanya diperoleh melalui SKD.

Hasil SKD menunjukkan persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS pada tahun 2016 mencapai 97.57 persen meningkat sebesar 0.38 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 yang mencapai 97.15 persen. Jika dibandingkan dengan target PK tahun 2016 yang sebesar 91 persen, maka capaian kinerja BPS untuk IKU tersebut sebesar 107.22 persen.

Gambar 9.
Target dan Realisasi Indikator “Persentase konsumen terhadap pelayanan data BPS” Tahun 2015 dan 2016



Tujuan kedua dicapai melalui satu sasaran strategis yaitu “Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (*user engagement*)”, dengan pengukuran keberhasilannya dinilai oleh empat IKU. Pada tahun 2016 kinerja sasaran tersebut belum sepenuhnya berhasil dicapai dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 94.36 persen. Data dan penjelasan keberhasilan/kegagalan pencapaian masing-masing indikator dari sasaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 4 dan penjelasan di bawah ini.

Tabel 6.
Capaian Kinerja Tujuan 2: Peningkatan Pelayanan Prima Hasil
Kegiatan Statistik 2016

Sasaran Strategis/Sasaran Strategis/Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi 2015	Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik					
Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS	91	97,57	107,22	97,19	0,38
SS3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>User Engagement</i>)					
Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS	91	97,57	107,22	97,19	0,38
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i> BPS	40.000	72.483	120,00	43.334	29.149
Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	20,49	6,03	29,42	-	-
Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS	90	97,68	108,53	98,74	-1,06
Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	90	95,99	106,66	96,76	-0,77
Rata-rata Capaian Kinerja			94,36		

SS3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement)

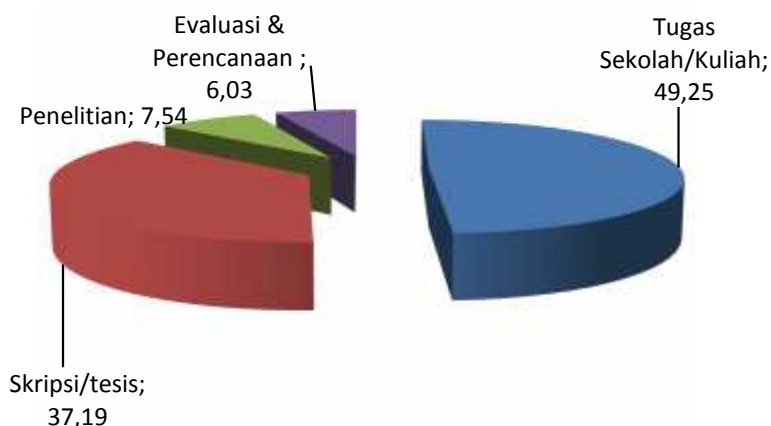
Tujuan kedua dicapai melalui satu sasaran strategis yaitu “Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (*user engagement*)”, dengan pengukuran keberhasilannya dinilai oleh lima IKU. Pada tahun 2016 kinerja sasaran tersebut belum sepenuhnya berhasil dicapai dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 94.36 persen. Data dan penjelasan keberhasilan/kegagalan pencapaian masing-masing indikator dari sasaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 4 dan penjelasan di bawah ini.

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui *website* pada tahun 2016 mencapai lebih dari 70 ribu pengunjung, jauh lebih besar dari target PK yang sebanyak 40 ribu pengunjung. Angka ini juga jauh lebih tinggi dari realisasi tahun 2015 yang mencapai lebih dari 43 ribu pengunjung. Perlu diinformasikan *website* yang dimaksud hanya untuk *websitentb.bps.go.id*, konsumen yang mengunjungi *website* selain yang disebutkan tidak dimasukkan dalam penghitungan kinerja.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menimbang bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan. Untuk mengukur keberhasilan BPS terhadap apa yang tercantum dalam undang-undang, maka pada tahun 2016 dilakukan reviu terhadap Renstra BPS tahun 2015-2019 dengan menambahkan satu indikator yaitu persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.

Sebagaimana indikator yang berkaitan dengan konsumen BPS, data indikator tersebut diperoleh melalui SKD. Pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 20.49 persen konsumen menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional, namun hasil SKD menunjukkan realisasinya hanya sebesar 6.03 persen. Artinya capaian kinerja IKU tersebut masuk dalam kategori merah dengan capaian kinerja sebesar 29.42 persen. Komposisi penggunaan data BPS oleh konsumen menurut hasil SKD dapat dilihat pada Gambar 10.

Gambar 10.
Profil Konsumen Menurut Pemanfaatan Data BPS Tahun 2016 (SKD 2016)



Salah satu cara untuk mencapai tujuan peningkatan pelayanan prima adalah dengan meningkatkan kapasitas akses data bagi konsumen. Dengan peningkatan kapasitas, diharapkan konsumen memperoleh data yang diperlukan dengan mudah,

cepat, dan murah. Keberhasilan BPS dalam meningkatkan kapasitas akses data dapat diukur melalui IKU “Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS”.

Hasil SKD menunjukkan jumlah konsumen yang puas terhadap akses data BPS mencapai 97,68 persen, lebih besar bila dibandingkan target PK yang sebesar 90,00 persen. Meskipun demikian kinerja untuk indikator ini mengalami penurunan sebesar 1,06 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015.

Sarana dan prasarana yang baik merupakan salah satu komponen dalam pelayanan. Oleh sebab itu SKD memasukkan komponen tersebut dalam daftar pertanyaan pada kuesioner SKD. Pertanyaan tersebut selanjutnya dihitung untuk mendapatkan capaian IKU yang juga merupakan salah satu Indikator kinerja keberhasilan Program PSPA BPS.

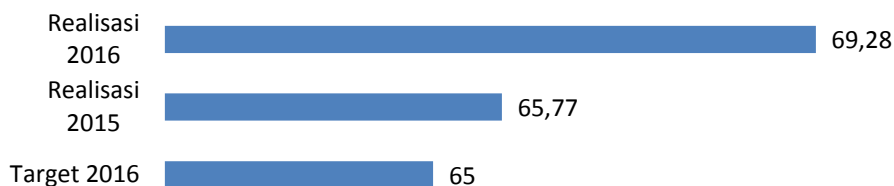
Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS pada tahun 2016 mencapai 95,99 persen. Angka ini jauh lebih besar bila dibandingkan target yang sebesar 90 persen dan realisasi tahun 2015 dengan persentase konsumen yang merasa puas sebesar 96,76 persen.

Tujuan Ketiga : Peningkatan Birokrasi yang Akuntabel

Salah satu hal yang menjadi inti dari reformasi birokrasi adalah akuntabilitas instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang akuntabel semakin penting keberadaannya mengingat semakin tingginya ekspektasi dan tuntutan masyarakat atas pelayanan pemerintah. BPS sebagai lembaga Negara juga harus meningkatkan akuntabilitasnya sebagaimana yang tertera pada Tujuan 4 Renstra BPS 2015-2019. Akuntabilitas dimaksud tidak hanya dari sisi keuangan saja, meskipun dari sisi tersebut mutlak diperlukan melainkan juga dari sisi kinerja. Dengan penguatan akuntabilitas ini, diharapkan akan memberi efek peningkatan kinerja yang pada gilirannya akan menghasilkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Setiap tahunnya Inspektorat BPS RI melakukan penilaian terhadap dokumen Sakip BPS Provinsi se Indonesia, atas dasar itulah nilai Sakip BPS Provinsi NTB diperoleh. Tahun 2016, nilai Sakip BPS Provinsi NTB mencapai 69,28 point. Angka ini jauh diatas target yang telah ditetapkan yaitu 65,28, Dengan demikian capaian kinerja yang diperoleh sebesar 106,58

Gambar 11.
Target dan Realisasi Indikator “Hasil Penilaian Sakip Oleh Inspektorat”
Tahun 2015 dan 2016



Tujuan ketiga adalah “Peningkatan birokrasi yang akuntabel”, diukur dengan indikator Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Tujuan ketiga dicapai dengan dua sasaran strategis, yaitu: (1) Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS, dan (2) Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS. Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 7.
Capaian Kinerja Tujuan 3: Peningkatan Birokrasi yang Akuntabel 2016

Sasaran Strategis/Sasaran Strategis/Indikator (1)	Target (2)	Realisasi (3)	Capaian (%) (4)	Realisasi 2015 (5)	Perubahan (6)
T3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel					
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	65	69,28	106,58	65,77	3.51
SS4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS					
Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	4	5,57	120,00	4	1.57
Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	70	79	112,86	70	9
Rata-rata Capaian Kinerja			116,43		
SS5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS					
Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	65	69,28	106,58	65,77	3.51
Jumlah Satker BPS Kabupaten/Kota Yang Berpredikat WBK/WBBM	1	1	100.00	1	0
Rata-rata Capaian Kinerja			103,29		

SS4: Meningkatnya Kualitas Manajemen Sumber Daya Manusia BPS

Agar pelayanan prima dapat diwujudkan maka diperlukan SDM yang berkualitas dan profesional. Oleh sebab itu pembinaan SDM diperlukan agar pegawai semakin meningkat kualitasnya mengingat kualitas SDM merupakan kunci utama yang dapat mengubah berbagai kelemahan menjadi kekuatan serta mengubah tantangan menjadi peluang. Pembinaan SDM merupakan suatu keharusan karena masyarakat mengharapkan hadirnya pemerintahan yang lebih tinggi kualitasnya dan lebih mampu mengemban fungsi-fungsi pelayanan publik.

Sasaran “Meningkatnya kualitas manajemen Sumber Daya Manusia BPS” diukur keberhasilannya melalui dua IKU. Rata-rata capaian kinerja ini pada tahun 2016 mencapai 116.43 persen

Indikator pertama adalah “Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu” Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Dalam rangka mencapai tujuan nasional, dibutuhkan adanya PNS dengan mutu profesionalisme yang memadai, berdayaguna, dan berhasilguna didalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. PNS perlu dibina dengan sebaik-baiknya atas dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja.

Persentase pegawai BPS Provinsi NTB yang menduduki jabatan fungsional pada tahun 2016 sebesar 5,57 persen, sedikit diatas target yang sebesar 4 persen. Besaran ini relatif sama jika dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 4 persen. Kedepan BPS Provinsi NTB perlu memperbanyak jumlah pegawai yang menduduki jabatan fungsional karena sistem penilaian jabatan fungsional di Provinsi NTB semakin di tingkatkan, sehingga tidak ada lagi hambatan dalam penilaian angka kredit.

Selanjutnya indikator kedua yaitu Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I. Tahun 2016 BPS Provinsi NTB sebanyak 79 persen pegawai telah berpendidikan minimal diploma IV atau strata 1 sementara target di awal sebesar 70 persen. Dari hasil ini maka capaian 2016 mencapai 112,86 persen. Jika dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 70 persen maka telah terjadi peningkatan, Dengan demikian upaya BPS Provinsi NTB dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pendidikan dapat dikatakan berhasil.

SS5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa bukan hanya akuntabilitas keuangan saja yang perlu diperhatikan, melainkan juga akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja paling tidak memberi manfaat kepada masyarakat yang ingin mengetahui seberapa besar efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan publik oleh pemerintah, yang notabene dibiayai oleh uang rakyat. Dengan melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja maka BPS Provinsi NTB diharapkan telah memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi BPS.

Pada SS5 terdapat 2 indikator yaitu “Hasil penilaian Sakip oleh Inspektorat” dan indikator “Jumlah satker BPS kab/kota yang berpredikat WBK/WBBM” rata-rata capaian indikator di SS5 mencapai 103.29.

Indikator pertama telah berhasil mencapai target dengan tingkat capaian mencapai 106,58 sedangkan indikator ke dua dari target 1 kabkota realisasi juga 1 sehingga tingkat capaiannya 100 persen. Adapun Kota Mataram berhasil mendapat predikat satker WBBM tahun 2016.

3.2. Capaian Kinerja BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 terhadap Target Renstra 2016 dan 2019

Rencana Strategis adalah proses pemilihan tujuan organisasi, penentuan kebijakan, dan program untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Rencana Strategis merupakan proses perencanaan jangka menengah (lima tahun) yang formal untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk mengetahui keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran perlu adanya pengukuran terhadap indikator-indikator yang mewakili pencapaian kedua hal tersebut.

Capaian kinerja 2016 jika dibandingkan dengan target Renstra 2016 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8.
Capaian Kinerja 2016 terhadap Target Renstra 2015-2019

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Target Renstra 2016	Target Renstra 2019	Realisasi	Capaian thd target 2016	Capaian thd target 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
T1. Peningkatan kualitas data statistik					
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	90	90	99.2	110.22	110.22
SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS					
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	90	90	99.2	110.22	110.22
Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	83	92	93.16	112.24	101.26
Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	100	100	100	100.00	100.00
Jumlah release data yang tepat waktu	28	28	31	110.71	110.71
Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu	26	25	36	120.00	120.00
Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu	1	1	2	120.00	120.00
SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>Respondent Engagement</i>)					
Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan rumah tangga	95	95	96.37	101.44	101.44
Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan usaha	93	93	91.35	98.23	98.23
Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	93	93	95.97	103.19	103.19
T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik					
Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS	90	90	97.57	108.41	108.41
SS3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>User Engagement</i>)					
Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS	90	90	97.57	108.41	108.41

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i> BPS	40.000	40.000	72.483	120.00	120.00
Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	24.9	25	6.03	24.22	24.12
Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS	90	90	97.68	108.53	108.53
Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	90	90	95.99	106.66	106.66
T3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel					
Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	52	60	69.28	120.00	115.47
SS4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS					
Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	4	4	5.57	120.00	120.00
Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	60	75	79	120.00	105.33
SS5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS					
Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	52	60	69.28	120.00	115.47
Jumlah satker kab/kota yang mendapat predikat WBK/WBBM	1	1	100.00	100.00	100.00

Dari tabel diatas, terlihat bahwa hampir semua indikator telah melampaui target renstra tahun 2016 maupun 2019, hanya dua indikator saja yang belum mencapai target. Kedua indikator tersebut adalah Persentase pemasukan dokumen (*response rate*) survei dengan pendekatan usaha dan Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.

Indikator pemasukan dokumen (*response rate*) survei dengan pendekatan usaha belum mencapai target untuk itu perlu di lakukan upaya baik di level kabkota maupun di tingkat Provinsi agar target dapat tercapai tanpa harus menurunkan target.

Sementara itu untuk indikator Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional dihasilkan dari Survei Kebutuhan Data (SKD). SKD yang dilaksanakan sampelnya relatif kecil sehingga hasilnya terkadang tidak relevan. Berkaitan dengan pengukuran indikator yang berasal dari survei SKD , maka perlu digali informasi lebih dalam lagi apakah perlu melakukan revisi terhadap target indikator tersebut.

3.3. Kegiatan Prioritas BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016

Kegiatan prioritas BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2016 diantaranya adalah Kegiatan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016), meliputi kegiatan Publisitas SE2016 dan pendaftaran (*Listing*) terhadap seluruh usaha/kegiatan yang ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau *Listing* Sensus Ekonomi (SE) 2016.

Pada tahun 2016 merupakan puncak pelaksanaan aktivitas Sensus Ekonomi (SE) 2016. Ukuran keberhasilan aktivitas ini pada tahun 2016 adalah tersedianya angka sementara perkiraan populasi usaha ekonomi non pertanian menurut skala usaha dan sektor ekonomi. Aktivitas ini masuk dalam Program PPIS pada kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi, capaian kinerja aktivitas ini dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9.
Capaian Kinerja Aktivitas Sensus Ekonomi 2016 Tahun Anggaran 2016

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Publikasi/Laporan Sensus Ekonomi 2016 yang terbit tepat waktu	2	2	100,00
Jumlah target perusahaan/usaha dengan realisasi SE2016	543.479	407.875	75,05
Rata rata Capaian Kineja			87.52

Aktivitas SE 2016 di Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan melalui 2 kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

- **Publisitas SE2016**

Berbagai cara digunakan untuk mengampanyekan SE2016. Hal ini dilakukan agar masyarakat luas dapat mengetahui urgensi ketersediaan data dasar perekonomian Indonesia yang sesuai dengan keadaan terkini sehingga tumbuh kesadaran untuk berpartisipasi aktif dan mendukung kelancaran pelaksanaannya. Dan data yang dihasilkan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang dilakukan sehingga tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan.

Berbagai upaya dilakukan oleh BPS Provinsi NTB untuk mensosialisasikan kegiatan SE 2016 antara lain mengadakan apel siaga di Lapangan Gubernur Provinsi NTB, sosialisasi di Pusat-pusat perbelanjaan dan sebagainya.

Maksud dan tujuan kegiatan ini yaitu untuk memberikan penjelasan secara rinci tentang kegiatan SE2016 serta pemanfaatan statistik ekonomi yang dihasilkan bagi semua kalangan, baik para pelaku ekonomi, pemerintah, swasta, maupun masyarakat luas. *Output* aktivitas ini adalah Laporan Publisitas SE2016.

- **Listing Usaha/Perusahaan**

Aktivitas SE2016 dimulai dengan tahapan Perencanaan dan Persiapan pada Tahun 2014, dilanjutkan pada tahun 2015 diantaranya kegiatan Gladi Bersih Listing SE2016 dan Uji Coba Pendataan UMK/UMB SE2016. Tahun 2016 adalah puncak dari SE2016 yaitu pendataan lengkap/*Listing* usaha/perusahaan SE2016. Aktivitas ini berupa pendaftaran bangunan dan usaha/perusahaan yang berada di dalam bangunan tersebut. Jika keberadaan suatu unit usaha/perusahaan telah diidentifikasi, maka kegiatan ini akan dilanjutkan dengan melakukan pendataan karakteristik usaha dan informasi lainnya. Target usaha pada pendataan ini akan terdata sebanyak 504 ribu usaha/perusahaan. Adapun realisasinya terdata sebanyak 407 ribu usaha/perusahaan atau sebesar 75,05 persen dari target. Upaya penyisiran telah dilakukan oleh petugas untuk mendata usaha/perusahaan dengan melibatkan seluruh petugas dan tim dari Provinsi maupun Kabupaten/kota serta memperpanjang masa pendataan, namun belum mencapai target. Penyebab tidak tercapainya target usaha tersebut antara lain adalah banyaknya usaha musiman yang kondisi pada saat pendataan SE2016 sudah tutup. Target yang digunakan di awal adalah jumlah usaha pada waktu SE2006

Output dari aktivitas ini adalah diperolehnya jumlah perusahaan/usaha skala mikro, kecil menengah dan besar juga Laporan Kegiatan Listing SE2016.

3.4. Upaya Efisiensi di BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016

Upaya efisiensi yang dilakukan BPS Provinsi NTB selama tahun 2016:

1. Agar terjadi efisiensi serta tidak terjadinya duplikasi data, terdapat aktivitas survei rutin dibidang ekonomi yang tidak diselenggarakan pada tahun 2016. Data yang dihasilkan dari survei tersebut akan diperoleh melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2016. Aktivitas tersebut adalah Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) Tahunan.
2. Hasil pengukuran yang dilakukan Kementerian Keuangan melalui Sistem Aplikasi SMART terhadap rata-rata efisiensi untuk setiap jenis *output* memberikan nilai 6,67 persen. Hal tersebut menunjukkan adanya efisiensi terhadap tercapainya target *output* bila dibandingkan dengan realisasi anggaran.
3. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2016 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp 26.704.343.916 atau 93,69 persen dari pagu sebesar Rp 28.500.400.000 jika dibandingkan dengan capaian kinerja

baik tujuan maupun sasaran yang masing masing sebesar 108.0 persen dan 104,48 persen, dapat dikatakan BPS Provinsi NTB telah melakukan efisiensi penggunaan anggaran. Efisiensi juga disebabkan karena adanya pagu *self blocking* yang secara total mencapai 1.453.853.000 atau mencapai 5.10 persen dari total pagu. Masing-masing program memiliki capaian kinerja yang lebih tinggi dari realisasi anggaran sebagaimana terlihat pada Tabel 10.

Tabel 10.
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran Menurut Program Tahun 2016

Program	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)
DMPTTL	100.00	95,73
PSPA	100.00	75,91
PPIS	100.00	93,63

3.5. Realisasi Anggaran BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016

Pagu yang diberikan ke BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menjalankan fungsi pemerintahan selama tahun 2016 adalah sebesar Rp 28.500.400.000,- yang terbagi ke dalam 3 (tiga) program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL), (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) dan (3) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Tahun 2016 terdapat pagu *self blocking* sebesar 1.453.853.000. Realisasi anggaran menurut program dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11.
Realisasi Anggaran Menurut Program Tahun 2016

Program	Pagu (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	(%)dg SB	<i>Self Blocking</i> (Rp.000)	(%) tanpa SB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)	9.587.004	9.177.637.3	94,73	138.62	97.13
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA)	1.023.420	776.838.7	75,91	245.408	99.85

Program	Pagu (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	(%)dg SB	Self Blocking (Rp.000)	(%) tanpa SB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	17.889.976	16.749.867.9	93,63	1.069.809	99.58
Total	28.500.400	26.704.343.9	93,69	1.453.853	98.73

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran BPS Provinsi NTB mencapai 93,69 persen, program DMPTTL adalah sebesar 94,73; realisasi anggaran program PSPA sebesar 75,91 persen; dan realisasi anggaran program PPIS adalah sebesar 93,63 persen. Jika pagu *self blocking* dikeluarkan maka realisasi akan menjadi lebih tinggi yaitu 98,73 persen.

3.6. Prestasi dan Inovasi

1. BPS Provinsi NTB berhasil memperoleh penghargaan UAPPA-W (054.01) dalam pelaksanaan rekonsiliasi penyusunan dan penyampaian laporan keuangan periode Tahun 2015. Penghargaan ini di umumkan pada Bulan Mei 2016.
2. Pada tahun 2016 BPS Provinsi NTB sebagai pembina satker-satker di wilayah Provinsi NTB berhasil membina satker-satker dibawah binaannya sehingga memperoleh penghargaan Antara lain:
 - BPS Kabupaten Lombok Barat sebagai Satker Berkinerja Terbaik triwulan III tahun 2016
 - BPS Kabupaten Lombok Timur memperoleh peringkat ke-1 atas kinerja keuangan satuan kerja mitra kerja KPPN selong tahun anggaran 2016 dan peringkat ke 3 pada tahun anggaran 2015
 - BPS Kabupaten Sumbawa Satker peringkat ke 4 kategori penyerapan anggaran tertinggi dan berkesinambungan tahun anggaran 2016.
3. Selain penghargaan BPS Provinsi NTB juga telah melakukan inovasi dengan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Program *One Data*. Program ini telah di *launching* pada tanggal 17 Desember 2016, pada saat ulang tahun Provinsi Nusa Tenggara Barat dan penandatanganan MOU dilakukan oleh Gubernur Provinsi NTB dan Kepala BPS RI.
4. BPS Provinsi NTB mendapat penghargaan kualitas data Susenas terbaik ke 4 untuk data Susenas periode September 2016 sesuai dengan Deputi Statistik Sosial No B-013/BPS/4200/01/2017.

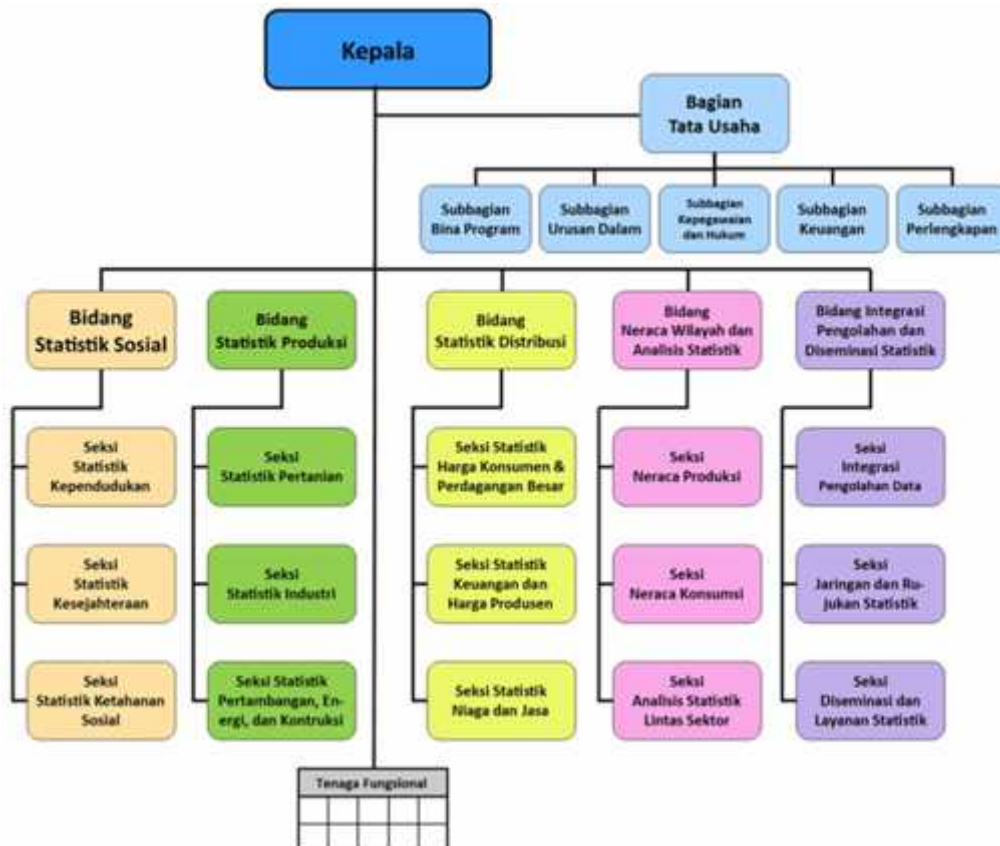
Secara keseluruhan capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016 telah tercapai, dengan rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 108,00 dan rata-rata capaian kinerja sasaran strategis sebesar 104,48. Meskipun demikian upaya-upaya peningkatan kinerja terus dilakukan oleh BPS Provinsi NTB, terutama dalam hal peningkatan kualitas data statistik dan pelayanan prima.

Disisi lain masih terdapat beberapa kekurangan terkait tidak tercapainya target indikator Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional, indikator tersebut hasil pengukurannya diperoleh dari hasil Survei Kebutuhan Data (SKD). Belum adanya rencana untuk menggantikan SKD dalam mengukur indikator dimaksud, maka perlu dilakukan penajaman (penurunan) target kinerja. Selain itu sampel SKD perlu di perbanyak untuk mendapatkan hasil yang lebih relevan. Dari beberapa indikator yang pengukurannya bersumber dari SKD seringkali tidak dapat diperbandingkan tiap tahunnya dikarenakan sampel yang relatif kecil.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Susunan Organisasi BPS Provinsi NTB



Lampiran 2. Renstra BPS Provinsi NTB 2015-2019

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target Kinerja				
		2015	2016	2017	2018	2019
Kementerian/Lembaga: Badan Pusat Statistik						
	SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS					
	1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	90%	90%	90%	90%	90%
	1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	80%	83%	86%	89%	92%
	1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	100%	100%	100%	100%	100%
	1.4. Jumlah release data yang tepat waktu	29	28	28	28	28
	1.5. Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu	27	26	27	26	25
	1.6. Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu	10	1	1	1	1
	SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent Engagement)					
	2.1. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga	95%	95%	95%	95%	95%
	2.2. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha	93%	93%	93%	93%	93%
	2.3. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	93%	93%	93%	93%	93%
	SS.3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement)					
	3.1. Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS	90%	90%	90%	90%	90%
	3.2. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	18.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	3.3. Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	-	20,49%	23%	24%	25%
	3.4. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS	90%	90%	90%	90%	90%
	3.5. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	90%	90%	90%	90%	90%
	SS.4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS					
	4.1. Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	4%	4%	4%	4%	4%
	4.2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	60%	60%	65%	70%	75%
	SS.5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS					
	5.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	50	52	55	58	60
	5.2. Jumlah satker BPS Kabupaten/Kota yang berpredikat WBK/WBBM	1	1	1	1	1

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja BPS Provinsi NTB Tahun 2016

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Wahyudin, M.M.
Jabatan : Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Dedi Walujadi, S.E., M.A.
Jabatan : Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Dedi Walujadi, S.E., M.A.
NIP. 19570923 198003 1 003

Mataram, 23 Februari 2016
Pihak Pertama

Drs. Wahyudin, M.M.
NIP. 19661231 199103 1 140

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
BPS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Tujuan/Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Satuan (3)	Target (4)
1. Peningkatan kualitas data statistik	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	90,00
1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	90,00
	Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Persen	90,00
	Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	Persen	100,00
	Jumlah <i>release</i> data yang tepat waktu	Aktivitas	28
	Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu	Publikasi	39
	Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu	Publikasi	2
	1.2 Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>Respondent Engagement</i>)	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan rumah tangga	Persen
Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan usaha		Persen	96,00
Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha		Persen	93,00
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS	Persen	91,00
2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>User Engagement</i>)	Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS	Persen	91,00
	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i> BPS	Pengunjung	40.000

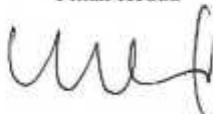
Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	20,49
	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS	Persen	90,00
	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	90,00
3. Peningkatan penyelenggaraan/ pelaksanaan birokrasi yang akuntabel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	65,00
3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS	Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	Persen	4,00
	Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	Persen	70,00
3.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	65,00
	Jumlah Satker BPS Kabupaten/Kota Yang Berpredikat WBK/WBBM	Satker	1

Program

Anggaran

- | | |
|---|--------------------|
| 1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Rp. 9.294.851.000 |
| 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp. 1.345.740.000 |
| 3 Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik | Rp. 21.575.869.000 |

Pihak Kedua



Dr. Dedi Walujadi, S.E., M.A.
NIP. 19570923 198003 1 003

Mataram, 23 Februari 2016
Pihak Pertama



Drs. Wahyudin, M.M.
NIP. 19661231 199103 1 140

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Endang Tri Wahyuningsih, MM
Jabatan : Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Dedi Walujadi, S.E., M.A.
Jabatan : Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Dedi Walujadi, S.E., M.A.
NIP. 19570923 198003 1 003

Mataram, 1 November 2016

Pihak Pertama

Ir. Endang Tri Wahyuningsih, MM
NIP.19650923 199003 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
BPS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Peningkatan kualitas data statistik	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	90,00
1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	90,00
	Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Persen	90,00
	Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	Persen	100,00
	Jumlah <i>release</i> data yang tepat waktu	Aktivitas	28
	Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu	Publikasi	35
	Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu	Publikasi	2
1.2 Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>Respondent Engagement</i>)	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan rumah tangga	Persen	91,00
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan usaha	Persen	96,00
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	Persen	93,00
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS	Persen	91,00
2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>User Engagement</i>)	Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS	Persen	91,00
	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i> BPS	Pengunjung	40.000

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	20,49
	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS	Persen	90,00
	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	90,00
3. Peningkatan penyelenggaraan/ pelaksanaan birokrasi yang akuntabel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	65,00
3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS	Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	Persen	4,00
	Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	Persen	70,00
3.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	65,00
	Jumlah Satker BPS Kabupaten/Kota Yang Berpredikat WBK/WBBM	Satker	1

Program

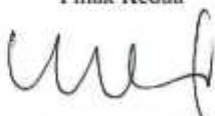
Anggaran

1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp. 9.376.927.000
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 1.023420.000
3 Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Rp. 17.889.976.000

Mataram, 1 November 2016

Pihak Pertama

Pihak Kedua



Dr. Dedi Walujadi, SE, M.A.
NIP. 19570923 198003 1 003



Ir. Endang Tri Wahyuningsih, MM
NIP.19650923 199003 2 002

Lampiran 4. Pengukuran Capaian Kinerja BPS Provinsi NTB Tahun 2016

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Periode	Perkiraan Realisasi	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
T1	Peningkatan kualitas data statistik	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	Tw I	0	0	0
				Tw II	0	0	0
				Tw III	0	0	0
				Tw IV	90,00	99,20	110,22
SS1	Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	Tw I	0	0	0
				Tw II	0	0	0
				Tw III	0	0	0
				Tw IV	90,00	99,20	110,22
		Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Persen	Tw I	0	0	0
				Tw II	0	0	0
				Tw III	0	0	0
				Tw IV	90,00	93,16	103,51
		Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	Persen	Tw I	0	0	0
				Tw II	0	0	0
				Tw III	0	0	0
				Tw IV	100,00	100,00	100,00
		Jumlah release data yang tepat waktu	Aktivitas	Tw I	7	7	100,00
				Tw II	13	14	107,69
				Tw III	20	22	110,00
				Tw IV	28	31	110,71
		Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu	Publikasi	Tw I	2	2	100,00
				Tw II	9	10	111,11
				Tw III	18	20	111,11
				Tw IV	35	36	102,86
Jumlah	Publikasi	Tw I	0	0	0		

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Periode	Perkiraan Realisasi	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu		Tw II	0	0	0
				Tw III	0	0	0
				Tw IV	2	2	100,00
SS2	Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>respondent engagement</i>)	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan rumah tangga	Persen	Tw I	38,66	39,62	102,48
				Tw II	52,16	53,27	102,13
				Tw III	82,53	76,88	93,15
				Tw IV	91	91,98	101,08
		Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan usaha	Persen	Tw I	12,09	17,54	145,08
				Tw II	33,6	39,02	116,13
				Tw III	56,98	64,4	113,02
				Tw IV	96	99,88	104,04
		Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	Persen	Tw I	7,05	14,77	120,00
				Tw II	23,55	29,73	120,00
				Tw III	53,67	66,51	120,00
				Tw IV	93,00	98,84	106,28
T2	Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS	Persen	Tw I	0	0	0
				Tw II	0	0	0
				Tw III	0	0	0
				Tw IV	91,00	97,00	106,59
SS3	Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>)	Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS	Persen	Tw I	0	0	0
				Tw II	0	0	0
				Tw III	0	0	0
				Tw IV	91	97,57	107,22
	Jumlah pengunjung	Pengun-	Tw I	9.500	17.586	120,00	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Periode	Perkiraan Realisasi	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i>	jung	Tw II	20.000	35.517	120,00
				Tw III	30.500	50.782	120,00
				Tw IV	40.000	72.483	120,00
		Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS	Persen	Tw I	0	0	0
				Tw II	0	0	0
				Tw III	0	0	0
				Tw IV	90	97,68	108,53
		Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	Tw I	0	0	0
				Tw II	0	0	0
				Tw III	0	0	0
				Tw IV	90	95,99	106,66
		T3	Peningkatan birokrasi yang akuntabel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	Tw I	0
Tw II	0					0	0
Tw III	0					0	0
Tw IV	65					69,28	106,58
SS4	Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS	Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	Persen	Tw I	4	4	100,00
				Tw II	4	6	100,00
				Tw III	4	5,57	120,00
				Tw IV	4	5,57	120,00
		Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	Persen	Tw I	70	70	100,00
				Tw II	70	70	100,00
				Tw III	70	79	112,86
				Tw IV	70	79	112,86

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Periode	Perkiraan Realisasi	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SS5	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	Tw I	0	0	0
				Tw II	0	0	0
				Tw III	0	0	0
				Tw IV	65	69,28	106,58
		Jumlah BPS Kabkota yang mendapat predikat WBK/WBBM	Point	Tw I	0	0	0
				Tw II	0	0	0
				Tw III	1	1	100,00
				Tw IV	1	1	100,00

Lampiran 5. SDM BPS Provinsi NTB Tahun 2016

No.	Unit Organisasi	Jenjang Pendidikan					Total
		≤SMA	D3	DIV/ S1	S2	S3	
1	Bagian Tata Usaha	10	3	14	2	0	29
2	Bidang Statistik Sosial	1	0	3	3	0	7
3	Bidang Statistik Produksi	1	0	6	1	0	8
4	Bidang Statistik Distribusi	3	1	3	2	0	9
5	Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik	0	0	4	3	0	7
6	Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik	1	0	7	1	0	9
Total		16	4	37	12	0	69

Lampiran 6. Kegiatan BPS Provinsi NTB Tahun 2016

No.	Kegiatan	Pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nop	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Listing Usah Perusahaan SE 2016												
2	Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Semesteran												
3	Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Tahunan												
4	Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor Dan Konsumsi Tahun 2016												
5	Survei Sosial Eknomi Nasional Konsumsi Dan MSBP 2016												
6	Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan												
7	Survei Hortikultura Dan Indikator Pertanian												
8	Survei Perusahaan Perkebunan												
9	Survei Perusahaan Pertenakan RPH/TPH												
10	Survei Perusahaan Perikanan, TPI/PPI/PF												
11	Survei Perusahaan Kehutanan												
12	Survei Industri Besar/Sedang Tahunan												
13	Survei Industri Besar Dan Sedang Bulanan												
14	Survei Pertambangan, Energi, Penggalian, Captive Power, Dan Updating Direktori												
15	Survei Konstruksi												
16	Survei Industri Mikro Dan Kecil (VIMK) Triwulanan												
17	Kompilasi Data Statistik Ekspor												
18	Survei Impor Daerah Perbatasan												
19	Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi												
20	Survei Waktu Tunggu (Dwelling Time) di Pelabuhan												
21	Survei Triwulanan Kegiatan Usaha Terintegrasi												
22	Kompilasi Data Statistik Transportasi												

No.	Kegiatan	Pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nop	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
23	Survei Angkutan Penumpang Dan Barang Di Terminal Dan Jembatan Timbang												
24	Survei Statistik Harga Produsen												
25	Harga Perdagangan Besar												
26	Indeks Kemahalan Konstruksi												
27	Survei Harga Konsumen Dan Survei Volume Penjualan Eceran Beras												
28	Survei Harga Perdesaan												
29	Statistik Lembaga Keuangan												
30	Survei Statistik Lembaga Keuangan Pemerintah Daerah												
31	Survei Statistik Badan Usaha Dan Pasar Modal												
32	Survei Penggunaan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi												
33	Survei Perusahaan Informasi Dan Komunikasi												
34	Survei Bidang Jasa Pariwisata												
35	Survei Konsumsi Bahan Pokok												
36	Penyusunan Nilai Tambah Lapangan Usaha Jasa Triwulanan 2010=100 (SKTNP Jasa)												
37	Penyusunan Neraca Rimah Tangga Dan Institusi Nirlaba												
38	Penyusunan Matriks PMTB Institusi Pemerintah Dan Non Pemerintah												
39	Konsolidasi PDRB Triwulanan Dan Tahunan Menurut Pengeluaran												
40	Indeks Tendensi Bisnis Dan Indeks Tendensi Konsumen												

Lampiran 7. Response Rate Survei Tahun 2016

Nama Survei	Target	Realisasi	Response Rate (%)
Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Semesteran	2.080	2.058	98,94
Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor dan Konsumsi Tahun 2016	6.320	6.227	98,53
Susenas modul kesehatan dan perumahan	1.580	1.580	100,00
Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan (sampel sub-s survei ubinan)	3.799	3.799	100,00
Survei Perusahaan Peternakan dan RPH/TPH (ept)	320	320	100,00
Survei Pershn. Perkebunan Tahunan	3	3	100,00
Survei Perusahaan Perkebunan Triwulanan	4	4	100,00
Survei Perusahaan Peternakan dan RPH/TPH (data perusahaan peternakan)	6	6	100,00
Survei Perusahaan Peternakan dan RPH/TPH (data rph/tph)	200	211	105,50
Survei Perusahaan Perikanan, tpi/ppi/pp (data perusahaan perikanan)	40	39	97,50
Survei Perusahaan Perikanan, tpi/ppi/pp (tpi)	28	28	100,00
Survei Industri Besar dan Sedang Bulanan	84	84	100,00
Survei Industri Besar/Sedang Tahunan	136	125	91,91
Survei Industri Mikro dan Kecil (vimk) Triwulanan	4.216	4.200	99,62
Survei Tahunan Perusahaan Pertambangan Non Migas	1	1	100,00
Survei Tahunan Perusahaan Listrik	1	1	100,00
Survei Tahunan Perusahaan Air Bersih	8	8	100,00
Survei Tahunan Penggalian Bahan Industri dan Konstruksi Berbadan hukum (galian-bh)	7	7	100,00

Nama Survei	Target	Realisasi	Response Rate (%)
Survei Tahunan Penggalian Bahan Industri dan Konstruksi urt (galian-urt)	54	59	109,26
Survei Captive Power	57	59	103,51
Updating Direktori Perusahaan Pertambangan dan Penggalian bh (daftar ud)	7	7	100,00
Updating Perusahaan Konstruksi (udp)	2.644	2.644	100,00
Survei Perusahaan Konstruksi Tahunan (SKTH)	161	161	100,00
Survei Perusahaan Konstruksi Triwulanan (SKTR)	162	162	100,00
survei usaha konstruksi perorangan (SKP)	500	500	100,00
survei hortikultura dan indikator pertanian (data luas panen setahun survei hortikultura)	116	116	100,00
survei perusahaan kehutanan (data kehutanan triwulanan di kab/kota)	40	40	100,00
survei perusahaan kehutanan (data kehutanan triwulanan di provinsi)	4	4	100,00
Survei Konstruksi	500	500	100,00
Survei Harga konsumen dan Survei Volume Penjualan Eceran Beras (HK 4 bulanan)	960	960	100,00
Survei Harga konsumen dan Survei Volume Penjualan Eceran Beras (HK 5 bulanan)	360	360	100,00
Survei Statistik Harga Produsen (Survei Monitoring Harga Produsen Gabah)	630	683	108,41
Survei Harga Perdesaan (harga perdesaan khusus hari raya)	36	36	100,00
Survei Harga Perdesaan (survei harga produsen perdesaan (hpd))	1.608	1.608	100,00
Survei Triwulanan Kegiatan Usaha Terintegrasi	123	116	94,31
Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi	55	55	100,00
Sensus Ekonomi 2016 (<i>Listing</i> usaha/perusahaan)	543.479	407.875	75,05
Survei Harga Perdagangan Besar (bulanan)	2.820	2.820	100,00

Nama Survei	Target	Realisasi	Response Rate (%)
Survei Harga Perdagangan Besar (hari raya)	252	252	100,00
Survei Harga Konsumen dan Survei Volume Penjualan Eceran Beras (HK 1.1 mingguan)	312	312	100,00
Survei Harga Konsumen dan Survei Volume Penjualan Eceran Beras (HK 1.2 dua mingguan)	144	144	100,00
Survei Harga Konsumen dan Survei Volume Penjualan Eceran Beras(HK 2.1 bulanan)	72	72	100,00
Survei Harga Konsumen dan Survei Volume Penjualan Eceran Beras(HK 2.2 bulanan)	48	48	100,00
Survei Harga Konsumen dan Survei Volume Penjualan Eceran Beras(HK 3 bulanan)	48	48	100,00
Survei Harga Konsumen dan Survei Volume Penjualan Eceran Beras (HK 6 bulanan)	336	336	100,00
Survei Harga Konsumen dan Survei Volume Penjualan Eceran Beras (svpeb-l)	15	15	100,00
Survei Harga Produsen Khusus Hari Raya	54	54	100,00
Survei Monitoring Harga Produsen Beras di Penggilingan	216	216	100,00
Survei Harga Produsen Umum Bulanan (HP-S)	360	360	100,00
Survei Harga Produsen Sektor Jasa (HP-J)	180	181	100,56
Survei Harga Produsen Pertanian	60	60	100,00
Survei Harga Konsumen Perdesaan (hkd)	756	756	100,00
Statistik Lembaga Keuangan (usaha koperasi simpan pinjam)	164	173	105,49
Survei Monitoring Valas	52	52	100,00
Survei Bidang Jasa Pariwisata (VHTS)	3.083	3.083	100,00
Survei Bidang Jasa Pariwisata(VHTL)	782	801	102,43
Survei Bidang Jasa Pariwisata (VIOT)	24	24	100,00
Survei Bidang Jasa Pariwisata (survei restoran)	15	15	100,00
Survei Bidang Jasa Pariwisata (survei spa)	31	31	100,00

Nama Survei	Target	Realisasi	Response Rate (%)
survei waktu tunggu (dwelling time) di pelabuhan (data (kuantitatif) waktu bongkar muat barang di pelabuhan)	40	40	100,00
Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah (keuangan kabupaten/kota)	10	10	100,00
Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah (keuangan provinsi)	1	1	100,00
Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah (keuangan desa)	105	101	96,19
Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah (keuangan kab/kota (apbd-2))	10	10	100,00
Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah (keuangan provinsi (apbd-1))	1	1	100,00
Indeks Kemahalan Kontruksi (pakom ikk)	40	40	100,00
survei khusus konsumsi rumahtangga triwulanan	800	796	99,50
indeks tendensi konsumen	1.160	1.160	100,00
survei khusus triwulanan neraca produksi barang	160	160	100,00
survei khusus triwulanan neraca produksi (sktnp) jasa	240	240	100,00
survei khusus perusahaan swasta non finansial (skps)	52	49	94,23
survei penyusunan matrik pmtb institusi pemerintah dan non pemerintah (mip.01 - mip.02)	50	49	98,00
survei khusus studi penyusunan perubahan inventori (skspji)	60	60	100,00
survei matrik arus komoditas (smak)	210	215	102,38
Indeks Tendensi Bisnis	76	76	100,00
up dating direktori LNPR	11	9	81,82
Survei Khusus Lembaga non profit triwulanan	400	392	98,00
Survei Khusus Struktur Input Pemerintah (SKSIP)	40	40	100,00
Survei Penyusunan Matrik PMTB institusi pemerintah dan non pemerintah (mi.01 - mi.09)	60	60	100,00
Survei Kebutuhan Data	150	150	100

Lampiran 8. Judul Publikasi Yang Terbit Tahun 2016

No.	Judul	Periode Terbit
1	Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015	Tahunan
2	Indeks Tendensi Konsumen Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015	Tahunan
3	Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015	Tahunan
4	Direktori Perusahaan Konstruksi Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015	Tahunan
5	Indeks Harga Konsumen Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015	Tahunan
6	Statistik Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015	Tahunan
7	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Lapangan Usaha 2015	Tahunan
8	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Pengeluaran 2015	Tahunan
9	Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2016	Tahunan
10	Statistik Alat dan Mesin Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015	Tahunan
11	Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015	Tahunan
12	Luas Lahan Menurut Penggunaan di Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015	Tahunan
13	Statistik Produksi Tanaman Padi dan Palawija Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015	Tahunan
14	Statistik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2016	Tahunan
15	Statistik Produksi Tanaman Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015	Tahunan
16	Indikator Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015	Tahunan
17	Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015	Tahunan
18	Statistik Harga Produsen Gabah Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015	Tahunan
19	Statistik Industri Besar dan Sedang Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015	Tahunan
20	Statistik Air Minum Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015	Tahunan
21	Statistik Rumah Potong Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015	Tahunan
22	Master File Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat Keadaan Semester I-2016	Tahunan
23	Statistik Transportasi Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015	Tahunan
24	Statistik Harga Pedesaan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015	Tahunan
25	Statistik Perhotelan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015	Tahunan
26	Survei Beras April 2016	Semesteran
27	Survei Beras Oktober 2016	Semesteran

No.	Judul	Periode Terbit
28	Indeks Tendensi Konsumen Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015	Tahunan
29	Statistik Pertambangan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015	Tahunan
30	Master File Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat Keadaan Semester 2-2016	Tahunan
31	Statistik Harga Produsen Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015	Tahunan
32	Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015	Tahunan
33	Laporan Publisitas SE 2016	Tahunan
34	Laporan Pendataan Listing SE2016	Tahunan
35	Direktori Perhotelan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2016	Tahunan
36	Indeks Tendensi Bisnis Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015	Tahunan

Lampiran 9. Daftar Instansi Yang Menerima Publikasi BPS Provinsi NTB 2016

No	Nama Instansi	Jumlah Publikasi Yang Diterima
1	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	1
2	BKPM-PT Provinsi Nusa Tenggara Barat	10
3	Dinas pendidikan pemuda dan olah Raga Provinsi NTB	3
4	Dinas Sosial Kependudukan dan catatan Sipil Provinsi NTB	3
5	Universitas Mataram	2
6	Dinas Perkebunan Provinsi NTB	6
7	PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat	1
8	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTB	3
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB	7
10	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB	3
11	Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Provinsi NTB	2
12	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB	3
13	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi NTB	7
14	Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Barat	2
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB	1
16	Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat	2
17	Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB	2
18	Badan Urusan Logistik Provinsi NTB	2
19	Bank Indonesia Mataram	12
20	Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	5
21	BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat	2
22	Institut Agama Islam Negeri Mataram	1
23	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat	1
24	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	4
25	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat	9
26	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi NTB	10
27	Badan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat	3
28	Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi NTB	12
29	Bidang Statistik Sosial	6
30	Bidang Statistik Produksi	14
31	Bidang Statistik Distribusi	2
32	Bidang NWAS	12
33	Bidang IPDS	1
34	Perpustakaan BPS Provinsi NTB	29
35	BPS Kabupaten/Kota	130
36	Seksi Perlengkapan BPS Provinsi NTB	15
37	Sekda Provinsi NTB	12
38	BAPPEDA Provinsi NTB	12
39	BPS Provinsi Se-Indonesia	65
40	BPS RI	6
41	Otoritas Jasa Keuangan	4
42	BPS Provinsi JabalNusra	16